

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum implementor sudah mengimplementasikan kebijakan penanggulangan pasung pada orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota namun pelaksanaannya belum optimal. Adapun temuan peneliti dilapangan yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan penanggulangan pasung pada orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota ialah terkait kesulitan teknis dalam pelaksanaannya. Hal ini didasari dengan kendala-kendala yang ditemukan ketika dilapangan seperti tidak semua implementor yang memiliki data terkait pemasangan, kurangnya tenaga kesehatan terlatih di bidang kesehatan jiwa maupun terkait ketersediaan obat-obatan yang terkadang tidak tersedia di puskesmas. Selanjutnya juga kesulitan dalam menangani perilaku kelompok sasaran kebijakan yang beragam, terlihat dari adanya beberapa penolakan dari pihak keluarga untuk melepaskan dengan pertimbangan keamanan bagi masyarakat, keluarga dan pasien itu sendiri. Kemudian juga terjadinya pemasangan kembali (*re-pasung*) dampak dari pasien yang tidak teratur meminum obat maupun juga karena faktor lingkungan.

Disamping hal tersebut, kurangnya sumberdaya finansial juga menyebabkan proses implementasi kebijakan penanggulangan pasung pada ODGJ menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari tidak adanya anggaran khusus untuk menjalankan kebijakan sementara cakupan dari kebijakan

tersebut luas. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat terutama keluarga ODGJ pasien pemasangan yang rata-rata berada pada garis kemiskinan juga menyebabkan permasalahan yang ingin diselesaikan oleh kebijakan menjadi sulit untuk dicapai, karena pihak keluarga lebih mementingkan mereka bekerja dan keberlangsungan hidupnya kedepan sehingga hak-hak ODGJ menjadi menjadi terabaikan. Dan hal yang juga penting berkaitan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan penanggulangan pasung pada ODGJ di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga dengan semua yang telah dijabarkan tersebut dapat dikatakan bahwa permasalahan pemasangan pada ODGJ di Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan permasalahan yang sulit untuk diselesaikan.

## 6.2 Saran

Adapun beberapa saran dan masukan dalam penelitian Impelementasi Kebijakan Penanggulangan Pasung pada Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebaiknya melakukan perbaikan terhadap kejelasan isi Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pasung pada Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga lebih memudahkan implementor dalam melaksanakannya atau membuat aturan penjas dari Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pasung pada Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota.



- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan untuk segera mengeluarkan SK Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) sesuai amanah Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2017 sehingga optimalisasi penanggulangan pasung pada ODGJ dapat tercapai sesuai kebijakan .
- c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholders* terkait, baik itu antar sesama Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat langsung maupun yang lainnya seperti halnya dengan pihak kecamatan, nagari maupun puskesmas.
- d. Meningkatkan penggunaan teknologi pada setiap upaya penanggulangan pemasangan seperti halnya promosi atau sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat, sistem pendataan terpadu yang valid serta akurat, dan lain sebagainya.
- e. Memberikan penghargaan (*reward*) kepada nagari maupun puskesmas yang mampu merangkul dan memberdayakan ODGJ dengan baik.
- f. Menutup segala peluang terjadinya kasus pasung baru maupun kasus pemasangan kembali (*re-pasung*) dengan cara melakukan pengjangkauan secara masif dan lebih luas lagi sehingga mengetahui situasi ditengah masyarakat.
- g. Memperkuat ikatan dalam keluarga sehingga hak-hak ODGJ tidak terabaikan seperti dalam melakukan kegiatan dengan mengikutsertakan semua anggota keluarga sehingga pasien ODGJ akan merasa keberadaannya dianggap oleh pihak keluarga.

